



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 188.4 / 33 / DPRD-BLG / 2025

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil Keputusan Bapemperda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan terkait Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan akan disepakati dan ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 4);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025 Nomor 29);

Memperhatikan :

- Rapat Bapemperda DPRD Kabupaten Balangan Pada Hari Selasa, 11 November 2025;
- Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Pada Hari Selasa tanggal 25 November 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2026.

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dalam Prioritas Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2026.

- KETIGA : Dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, yaitu dalam hal:
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerjasama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memasukkan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda DPRD dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 188.342/31/DPRD-BLG/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Paringin
pada tanggal : 25 November 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN



Hi. LINDAWATI, S.Sos.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BALANGAN
NOMOR : 188.4/33/DPRD-BLG/ 2025
TANGGAL : 25 November 2025

NO	JUDUL RAPERDA	PENGUSUL	MITRA KERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa	DPRD Kabupaten Balangan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan
2.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Jaminan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Yatim dan Anak Yatim Piatu Terlantar	DPRD Kabupaten Balangan	Dinas Sosial Kabupaten Balangan
3.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan	DPRD Kabupaten Balangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Balangan
4.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	DPRD Kabupaten Balangan	Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Balangan
5.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan	DPRD Kabupaten Balangan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan
6.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren	DPRD Kabupaten Balangan	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Balangan

7.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Pencegahan, Pengendalian, Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran	DPRD Kabupaten Balangan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan
8.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Penamaan Jalan, Bangunan Gedung dan Kawasan Wisata	DPRD Kabupaten Balangan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan
9.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Fasilitasi Sertifikat Makanan Sehat dan Halal	DPRD Kabupaten Balangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan
10.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif	DPRD Kabupaten Balangan	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Balangan
11.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Lansia	DPRD Kabupaten Balangan	Dinas Sosial Kabupaten Balangan
12.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Badan Usaha Milik Desa	DPRD Kabupaten Balangan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan
13.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Penggabungan Desa Wonorejo dan Sumber Rezeki di Kecamatan Juai	Pemerintah Daerah Kab.Balangan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan
14.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Tanah	Pemerintah Daerah Kab.Balangan	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan

15.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pemerintah Daerah Kab.Balangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Balangan
16.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan	Pemerintah Daerah Kab.Balangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Balangan
17.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Pembentukan Kawasan Pertanian Berbasis Agropolitan	Pemerintah Daerah Kab.Balangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Balangan
18.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas	Pemerintah Daerah Kab.Balangan	Dinas Sosial Kabupaten Balangan
19.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal	Pemerintah Daerah Kab.Balangan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan
20.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Bangunan Gedung	Pemerintah Daerah Kab.Balangan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan
21.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Bantuan Pendidikan Kepada Masyarakat	Pemerintah Daerah Kab.Balangan	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Balangan
22.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pemerintah Daerah Kab.Balangan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan
23.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pemerintah Daerah Kab.Balangan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan

24.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025	Pemerintah Daerah Kab.Balangan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan
25.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026	Pemerintah Daerah Kab.Balangan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan
26.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2027	Pemerintah Daerah Kab.Balangan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN



KETUA,

Hj. LINDAWATI, S.Sos.